

**ANALISIS KEBIJAKAN ASPIRATIF ANGGOTA DPD RI DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI PALEMBANG**

**<sup>1</sup>Wiwin, <sup>2</sup>Doly Nofiansyah, <sup>3</sup>Chandra Satria, <sup>4</sup>Amir Salim**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Bisnis Syariah, Universitas Indo Global Mandiri

Email: <sup>1</sup>[wiwinbae26@gmail.com](mailto:wiwinbae26@gmail.com), <sup>2</sup>[doly@uigm.co.id](mailto:doly@uigm.co.id), <sup>3</sup>[chandras@stebisigm.ac.id](mailto:chandras@stebisigm.ac.id),  
<sup>4</sup>[amirsalim@stebisigm.ac.id](mailto:amirsalim@stebisigm.ac.id)

**ARTICLE INFO**

**Kata Kunci:**

*Implementasi kebijakan, Kebijakan aspiratif, DPD RI, Pemberdayaan UMKM, George C. Edward III.*

**Cara Sitasi:**

Penulis, Wiwin, Doly Nofiansyah, Chandra Satria, Amir Salim.

“Analisis Kebijakan Aspiratif Anggota DPD RI dalam Pemberdayaan UMKM di Palembang.”

Currency:

Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah

Volume 05, Nomor 01 Juli 2026

**ABSTRACT**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan aspiratif Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan di lapangan. Informan penelitian terdiri atas Anggota DPD RI, staf ahli, tenaga administrasi, dan pelaku UMKM yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edward III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aspiratif telah diwujudkan melalui kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat, pelatihan kewirausahaan, pendampingan UMKM, fasilitasi akses permodalan, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan implementasi didukung oleh komunikasi yang efektif, komitmen para pelaksana, partisipasi masyarakat, dan sinergi antar lembaga. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, belum optimalnya pendampingan usaha, rendahnya literasi digital sebagian pelaku UMKM, serta koordinasi lintas sektor yang belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan aspiratif Anggota DPD RI memberikan kontribusi dalam memperkuat kapasitas dan pemberdayaan UMKM di Kota Palembang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya, serta pendampingan yang berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pengembangan UMKM.

*This study aims to analyze the implementation of the aspirational policy of members of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) in supporting the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Palembang City. A qualitative descriptive approach was employed to obtain a comprehensive understanding of policy implementation in practice. The research participants consisted of DPD RI members, expert staff, administrative personnel, and MSME actors selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and analyzed using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldaña. The policy implementation was examined using George C. Edward III's framework, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that the implementation of the aspirational policy has been carried out through public aspiration forums, entrepreneurship training, MSME mentoring, facilitation of access to financing, and collaboration with various stakeholders. Effective communication, implementers' commitment, community participation, and institutional collaboration have become the main supporting factors. However, several challenges remain, including limited budget allocation, inadequate business mentoring, insufficient digital literacy among some MSME actors, and suboptimal cross-sector coordination. The study concludes that the implementation of DPD RI's aspirational policy has contributed to strengthening the capacity and empowerment of MSMEs in Palembang City. Therefore, stronger inter-institutional coordination, improved institutional capacity, and sustainable assistance are essential to enhance the effectiveness of policy implementation and maximize its impact on MSME development.*

## **Pendahuluan**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa sektor ini menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi nasional dan memiliki daya tahan yang relatif tinggi dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi, termasuk krisis dan perubahan lingkungan bisnis (OECD, 2023; Badan Pusat Statistik, 2024). Oleh karena itu, penguatan kapasitas UMKM menjadi salah satu agenda prioritas dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2024).

Meskipun memiliki kontribusi yang besar, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat peningkatan daya saing usaha. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya inovasi produk, rendahnya literasi digital, serta terbatasnya akses terhadap pasar merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan usaha mikro dan kecil (Alsyouf et al., 2022;

González-Varona et al., 2024; OECD, 2023). Selain itu, transformasi digital menuntut pelaku UMKM untuk mampu mengadopsi teknologi informasi sebagai sarana pemasaran, pengelolaan usaha, dan perluasan jaringan bisnis sehingga dukungan kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM (Rahayu & Day, 2017; Proietti & Magnani, 2025).

Dalam perspektif administrasi publik, efektivitas pemberdayaan UMKM tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat cenderung lebih responsif karena mencerminkan kondisi riil yang dihadapi kelompok sasaran. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan menjadi salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik (Howlett et al., 2020; Ansell & Gash, 2008; Fuat & Salomo, 2023).

Sebagai lembaga perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki fungsi konstitusional untuk menyerap, menghimpun, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional. Fungsi tersebut diwujudkan melalui kegiatan reses, kunjungan kerja, dialog dengan masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, aspirasi pelaku UMKM menjadi salah satu isu strategis yang perlu diperjuangkan karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Rachman & Thalib, 2025).

Kota Palembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi UMKM yang besar pada sektor perdagangan, kuliner, kerajinan, dan industri kreatif. Namun demikian, berbagai permasalahan masih dihadapi oleh pelaku UMKM, antara lain keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, legalitas usaha yang belum optimal, serta kurangnya pendampingan usaha secara berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan, koordinasi antar lembaga, komunikasi kebijakan, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media (Novitasari et al., 2025; Ariani et al., 2024; Rahayu, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji fungsi DPD RI dari perspektif legislasi, pengawasan, dan representasi dalam sistem ketatanegaraan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis kebijakan aspiratif Anggota DPD RI dalam konteks pemberdayaan UMKM masih relatif terbatas, khususnya di Kota Palembang. Keterbatasan kajian tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk memberikan perspektif baru mengenai bagaimana fungsi representasi DPD RI dapat diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan aspiratif Anggota DPD RI dalam pemberdayaan UMKM di Kota Palembang dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan dan fungsi representasi lembaga negara, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi DPD RI, pemerintah daerah, serta para pemangku

kepentingan dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### **Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik karena menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat diwujudkan melalui tindakan nyata. Implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pelaksana, koordinasi antar lembaga, komunikasi, serta dukungan para pemangku kepentingan. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang efektif akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih berkualitas serta meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat (Wijatmoko et al., 2025; Anggara & Hanoselina, 2025).

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, implementasi kebijakan memerlukan kolaborasi lintas sektor agar program yang dirancang dapat menjawab kebutuhan pelaku usaha. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan UMKM, terutama dalam menghadapi tantangan transformasi digital dan peningkatan daya saing usaha (Rachman & Thalib, 2025; Ilham et al., 2025).

#### **2. Kebijakan Aspiratif Anggota DPD RI**

Kebijakan aspiratif merupakan kebijakan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga implementasinya lebih responsif terhadap permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga perwakilan memiliki fungsi strategis dalam menghimpun aspirasi masyarakat dan mengawal implementasi kebijakan agar selaras dengan kebutuhan daerah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa representasi politik yang efektif tidak hanya diukur dari kemampuan menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga dari keberhasilan mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi lokal (Rachmawati et al., 2025).

Selain itu, peran aktor kebijakan (*policy entrepreneur*) menjadi faktor penting dalam mempercepat proses implementasi kebijakan melalui pembangunan jejaring kemitraan, koordinasi lintas sektor, dan penguatan rantai pasok UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan aspiratif memerlukan kepemimpinan, inovasi, dan kolaborasi yang kuat antar aktor kebijakan (Novitasari et al., 2025).

#### **3. Pemberdayaan UMKM**

Pemberdayaan UMKM merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui penguatan akses pembiayaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan inovasi, digitalisasi usaha, serta perluasan akses pasar. Pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan akan meningkatkan produktivitas, daya saing, dan ketahanan ekonomi masyarakat. Penelitian Ariani, Cahyono, dan Azizah (2024) menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan apabila didukung oleh pelatihan, pendampingan, digitalisasi usaha, dan akses pasar yang memadai.

Selanjutnya, penelitian Fadillah et al. (2025) menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM memerlukan sinergi model *pentahelix* yang

melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media sehingga mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM juga harus didukung oleh regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha. Wibowo (2022) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan peluang yang lebih besar bagi penguatan UMKM, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek koordinasi, pendampingan, dan pengawasan pelaksanaannya.

### **Pengembangan Hipotesis**

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang didukung oleh komunikasi yang efektif, koordinasi lintas sektor, kepemimpinan kolaboratif, serta dukungan sumber daya yang memadai akan meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan UMKM (Wijatmoko et al., 2025; Rachman & Thalib, 2025; Novitasari et al., 2025).

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut.

- H1: Implementasi kebijakan aspiratif Anggota DPD RI berpengaruh positif terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Palembang.
- H2: Komunikasi dalam implementasi kebijakan aspiratif Anggota DPD RI berpengaruh positif terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Palembang.
- H3: Ketersediaan sumber daya dalam implementasi kebijakan aspiratif Anggota DPD RI berpengaruh positif terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Palembang.
- H4: Disposisi pelaksana kebijakan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Palembang.
- H5: Struktur birokrasi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Palembang.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif karena pendekatan tersebut mampu menjelaskan suatu fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman, persepsi, serta interaksi para informan yang terlibat dalam suatu konteks tertentu (Creswell & Creswell, 2023). Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan publik yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan kuantitatif (Merriam & Tisdell, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi kebijakan aspiratif Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang.

Penelitian dilaksanakan di Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Selatan serta beberapa lokasi usaha UMKM di Kota Palembang. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah representasi Anggota DPD RI yang secara aktif melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi dan pemberdayaan UMKM (Yin, 2023).

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan secara langsung terhadap fenomena yang diteliti (Patton, 2020). Teknik ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif karena mampu menghasilkan informasi yang mendalam dari informan yang benar-benar memahami permasalahan penelitian (Sugiyono, 2022). Informan dalam penelitian ini terdiri atas Anggota DPD RI Provinsi



Sumatera Selatan, staf ahli, tenaga administrasi, serta pelaku UMKM yang pernah mengikuti program pemberdayaan yang difasilitasi oleh Anggota DPD RI.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan aspiratif, bentuk pemberdayaan UMKM, serta persepsi para informan terhadap efektivitas kebijakan tersebut (Creswell & Poth, 2024). Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi melalui laporan kegiatan, arsip kelembagaan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan (Merriam & Tisdell, 2023).

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi (Lincoln & Guba, 2021). Penggunaan triangulasi dalam penelitian kualitatif bertujuan meningkatkan validitas dan konsistensi temuan penelitian (Sugiyono, 2022).

Analisis data mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (drawing and verifying conclusions) (Miles et al., 2020). Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga peneliti mampu memperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena implementasi kebijakan yang diteliti.

Sebagai landasan analisis, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Meskipun model ini telah lama dikembangkan, berbagai penelitian kontemporer masih menggunakannya karena dinilai relevan dalam menjelaskan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, khususnya pada program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah (Hill & Hupe, 2022).

### **Hasil Penelitian**

Analisis implementasi kebijakan aspiratif Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang dilakukan berdasarkan empat dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan kebijakan sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala implementasinya.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan aspek yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan karena berfungsi sebagai media penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, penyampaian kebijakan aspiratif kepada pelaku UMKM dilakukan melalui kegiatan reses, sosialisasi, dialog langsung dengan masyarakat, serta forum diskusi yang diselenggarakan secara berkala. Kegiatan reses menjadi sarana utama bagi Anggota DPD RI dalam menghimpun aspirasi sekaligus menyampaikan informasi mengenai program pemberdayaan UMKM kepada masyarakat.

Selain komunikasi secara tatap muka, penyebaran informasi juga memanfaatkan media digital, khususnya media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Pemanfaatan platform digital dinilai mampu memperluas jangkauan informasi sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui pelaksanaan program. Di sisi lain, penyampaian informasi dari mulut ke mulut masih menjadi salah satu media komunikasi yang cukup efektif, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam mengakses media digital. Kombinasi antara komunikasi langsung dan media digital menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan keterjangkauan informasi kepada Masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang diterapkan telah memenuhi unsur kejelasan dan konsistensi sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan intensitas penyampaian informasi agar seluruh pelaku UMKM memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses program pemberdayaan.

## **2. Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemberdayaan UMKM didukung oleh keterlibatan Anggota DPD RI, staf ahli, tenaga administrasi, serta berbagai pihak yang berperan dalam penyelenggaraan kegiatan. Sinergi antara pelaksana menjadi modal penting dalam memastikan setiap tahapan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain sumber daya manusia, dukungan terhadap UMKM diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses informasi, pendampingan usaha, serta upaya memperluas akses terhadap pembiayaan dan pemasaran. Program-program tersebut memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mengembangkan usaha.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan anggaran dan sumber daya pendukung masih menjadi kendala dalam menjangkau seluruh pelaku UMKM di Kota Palembang. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pendampingan belum dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan.

## **3. Disposisi**

Disposisi berkaitan dengan komitmen, sikap, dan kesungguhan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggota DPD RI bersama staf pendukung memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan reses, koordinasi dengan berbagai lembaga, penyelenggaraan pelatihan, serta fasilitasi berbagai kebutuhan pelaku usaha.

Pelaku UMKM juga memberikan respons positif terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan. Mereka menilai bahwa keberadaan kegiatan pemberdayaan mampu meningkatkan wawasan kewirausahaan, memperluas jejaring usaha, serta membuka peluang memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang baik antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran sehingga implementasi program dapat diterima secara positif oleh masyarakat.

Namun demikian, beberapa pelaku UMKM masih mengharapkan adanya pendampingan yang lebih intensif setelah kegiatan selesai dilaksanakan agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas koordinasi dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan aspiratif melibatkan koordinasi antara Anggota DPD RI, staf ahli, tenaga administrasi, pemerintah daerah, serta berbagai instansi yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Pembagian tugas yang jelas memberikan kemudahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan.

Meskipun mekanisme koordinasi telah berjalan dengan baik, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya sinergi lintas lembaga dalam menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat. Sebagian program memerlukan koordinasi yang lebih luas dengan pemerintah daerah maupun instansi teknis sehingga proses implementasi seringkali membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Temuan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh pembagian tugas, tetapi juga oleh kemampuan membangun koordinasi yang berkesinambungan antarorganisasi.

#### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aspiratif Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang secara umum telah berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan sehingga keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada substansi kebijakan, tetapi juga pada kapasitas organisasi pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Hill & Hupe, 2022; Howlett et al., 2020).

Pada dimensi komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggota DPD RI telah melakukan berbagai upaya penyerapan dan penyampaian aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, sosialisasi, dialog publik, forum diskusi, serta pemanfaatan media digital. Komunikasi yang terbangun mampu meningkatkan akses informasi bagi pelaku UMKM mengenai berbagai program pemberdayaan yang tersedia. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan partisipatif menjadi prasyarat penting dalam menciptakan implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wijatmoko et al. (2025) yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis kolaborasi. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Darumurti et al. (2025) yang menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dan koordinasi antar lembaga mampu mempercepat pelaksanaan program pengembangan UMKM melalui pendekatan *collaborative governance*.

Pada dimensi sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan didukung oleh keterlibatan Anggota DPD RI, staf ahli, tenaga administrasi, serta dukungan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa keterbatasan anggaran, jumlah pendamping UMKM yang belum memadai, serta terbatasnya sarana pendukung masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kecukupan sumber daya merupakan



faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini mendukung temuan Fuat dan Salomo (2023) yang menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya sering menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Selain itu, penelitian Rachman dan Thalib (2025) menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan sumber daya menjadi prasyarat dalam membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan.

Pada dimensi disposisi, penelitian menemukan bahwa komitmen Anggota DPD RI beserta jajaran pendukungnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Komitmen tersebut tercermin melalui upaya membangun komunikasi yang intensif dengan pelaku UMKM, memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah, serta memperjuangkan berbagai kebutuhan pelaku usaha dalam forum-forum kebijakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa sikap, integritas, dan komitmen pelaksana kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Novitasari et al. (2025) yang menyatakan bahwa kepemimpinan kebijakan (*policy entrepreneur*) berperan penting dalam menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan proses perumusan dan implementasi kebijakan publik.

Pada dimensi struktur birokrasi, penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aspiratif telah didukung oleh mekanisme koordinasi antara DPD RI, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Akan tetapi, koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat perbedaan prioritas program, keterbatasan sinkronisasi antar instansi, serta belum adanya mekanisme evaluasi terpadu yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang adaptif dan kolaboratif menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Temuan ini mendukung hasil penelitian Anggara dan Hanoselina (2025) yang menjelaskan bahwa koordinasi birokrasi yang efektif mampu meningkatkan kualitas implementasi kebijakan publik, serta penelitian Darumurti et al. (2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemberdayaan UMKM memerlukan sinergi antarlembaga melalui pendekatan *collaborative governance*.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan aspiratif Anggota DPD RI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyerapan aspirasi masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat kapasitas UMKM melalui fasilitasi pelatihan, penyampaian informasi, penguatan jejaring kelembagaan, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya literasi digital sebagian pelaku UMKM, belum optimalnya pendampingan usaha, dan perlunya penguatan koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, implementasi kebijakan aspiratif perlu diarahkan pada penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar pemberdayaan UMKM dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan aspiratif Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang telah diimplementasikan melalui berbagai bentuk kegiatan yang

berorientasi pada penyerapan aspirasi masyarakat, penguatan kapasitas pelaku usaha, serta pembangunan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi melalui kegiatan reses, sosialisasi, dialog langsung, serta pemanfaatan media digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku UMKM dalam memperoleh informasi mengenai program pemberdayaan. Pada dimensi sumber daya, keterlibatan Anggota DPD RI, staf pendukung, serta dukungan berbagai pihak menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan, meskipun masih terdapat keterbatasan anggaran dan pendampingan yang mempengaruhi jangkauan program. Selanjutnya, dimensi disposisi menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari para pelaksana dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM. Sementara itu, dari sisi struktur birokrasi, koordinasi antarlembaga telah berjalan cukup baik, namun efektivitas implementasi masih memerlukan penguatan sinergi agar proses tindak lanjut aspirasi dapat berlangsung lebih optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan aspiratif Anggota DPD RI memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemberdayaan UMKM di Kota Palembang, terutama dalam meningkatkan akses informasi, memperkuat kapasitas pelaku usaha, serta memperluas jejaring kerja sama. Meskipun demikian, efektivitas implementasi kebijakan masih memerlukan perbaikan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas sumber daya, optimalisasi pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh pelaku UMKM.

Saran dari peneliti untuk hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa penguatan fungsi representasi Anggota DPD RI perlu diiringi dengan koordinasi yang lebih erat bersama pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam merancang program pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan publik melalui penerapan teori George C. Edward III pada konteks kebijakan aspiratif DPD RI, yang masih relatif terbatas dalam literatur administrasi publik di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah penelitian serta melibatkan lebih banyak informan dan pemangku kepentingan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan aspiratif dalam mendukung pengembangan UMKM.

**Daftar Pustaka**

- Alsyouf, A., Alshurideh, M. T., Al Kurdi, B., Alzoubi, H. M., Hamadneh, S., & Masa'deh, R. (2022). Digital transformation and its impact on business resilience and competitiveness of small and medium enterprises. *Sustainability*, 14(19), 12340.
- Anggara, S., & Hanoselina, H. (2025). Implementasi kebijakan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(1), 45–59.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ariani, D., Cahyono, E., & Azizah, N. (2024). MSME empowerment policy and local economic development in Indonesia. *Journal of Economics and Social Sciences*, 3(2), 101–116.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Darumurti, A., Fridayani, H. D., Atmojo, M. E., & Chiang, L. C. (2025). Collaborative governance in driving MSME technology adoption for smart economy acceleration in Yogyakarta. *Journal of Government and Civil Society*, 9(2). <https://doi.org/10.31000/jgcs.v9i2.13766>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fadillah, M., Nugraha, R., & Suryana, Y. (2025). Pentahelix collaboration model in strengthening MSMEs for sustainable local economic development. *Aksy: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Islam*, 7(1), 44–59.
- Fuat, M. A., & Salomo, R. V. (2023). Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Koperasi dan UKM. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 8(2), 462–476.
- González-Varona, J. M., López-Paredes, A., Poza, D., & Acebes, F. (2024). Building and development of organizational competence for digital transformation in SMEs. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 31(5), 1023–1045.
- Hill, M., & Hupe, P. (2022). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (4th ed.). London: Sage Publications.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Principles and Processes* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Ilham, M., Prasetyo, A., & Kurniawan, D. (2025). Collaborative governance in public policy implementation: Strengthening institutional capacity through stakeholder collaboration. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(1), 15–31.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2021). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2023). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Novitasari, D., Widodo, J., & Suryanto, A. (2025). Policy entrepreneur dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis ekonomi lokal. *Jurnal Bina Praja*, 17(1), 45–59.
- Novitasari, D., Widodo, J., & Suryanto, A. (2025). Policy entrepreneur dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis ekonomi lokal. *Jurnal Bina Praja*, 17(1), 45–59.
- OECD. (2021). *The Digital Transformation of SMEs*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2023). *OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2023*. Paris: OECD Publishing.
- Patton, M. Q. (2020). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (5th ed.). Sage Publications.

- Proietti, S., & Magnani, R. (2025). Assessing artificial intelligence adoption and digitalization in small and medium enterprises: A framework for implementation. *Journal of Small Business Management*, 63(1), 1–24.
- Rachman, A., & Thalib, M. A. (2025). Collaborative governance dalam pemberdayaan UMKM berbasis pentahelix di Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 55–70.
- Rachmawati, D., Prasetyo, B., & Wulandari, R. (2025). Political representation and regional policy responsiveness in strengthening local economic development. *Jurnal Bina Praja*, 17(2), 121–138.
- Rahayu, R., & Day, J. (2017). E-commerce adoption by SMEs in developing countries: Evidence from Indonesia. *Information Development*, 33(4), 1–15.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Wibowo, A. (2022). Implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2), 89–104.
- Wijatmoko, S., Akbar, B., Sartika, I., & Elsyie, R. (2025). Collaborative governance in digital transformation policy implementation for MSMEs in Jakarta: A socio-legal perspective. *Jurnal Hukum*, 41(2), 366–393. <https://doi.org/10.26532/jh.v41i2.45941>
- Yin, R. K. (2023). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (7th ed.). Sage Publications.